

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENEGRAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI JALAN TOL MENGENAI BATAS KECEPATAN MAKSIMAL KENDARAAN (Studi di Jalan Tol Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar)

Oleh
DHEA HANI SYAPUTRI

Banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas di jalan tol yang dilakukan oleh pengguna jalan yang mengakibatkan angka kecelakaan lalu lintas semakin meningkat. Implikasi dari permasalahan antara lain menyangkut pelanggaran hukum lalu lintas yaitu pelanggaran batas kecepatan kendaraan. Untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas, maka diperlukan regulasi mengenai bagaimana berlalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien. Permasalahan yang diangkat menjadi topik penelitian ini adalah bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas di jalan tol Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar, implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan tol mengenai batas kecepatan maksimal kendaraan Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar, faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan tol mengenai batas kecepatan maksimal kendaraan Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber datanya yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka, dan studi lapangan. Data kemudian diolah dan pengolahannya meliputi seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data yang kemudian dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan yang diperoleh dari penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan tol mengenai batas kecepatan maksimal kendaraan adalah berupa penilangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Dirlantas Polda Lampung dengan memasang alat berupa kamera CCTV atau yang disebut dengan speed gun. Penegakan hukum pidana berupa sanksi yang telah diatur dalam Pasal 287 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000,00. Faktor penghambat adalah dari faktor sarana dan fasilitas yaitu jumlah titik persebaran kamera yang masih minim. Faktor penegak hukum dan faktor masyarakat juga menjadi penghambat karena aparatur penegak

Dhea Hani Syaputri

hukum masih kurang dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan masih banyak pengendara yang lalai terhadap aturan yang berlaku seperti bermain handphone, tidak mengenakan sabuk pengaman, mengantuk, dan hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Saran dalam penelitian ini ialah masyarakat seharusnya sadar akan manfaat dan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Diharapkan kepada pihak kepolisian untuk terus melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat tentang pelanggaran batas kecepatan maksimal kendaraan di jalan tol Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar agar terus memberikan kesadaran masyarakat dalam memahami dan mentaati peraturan tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Penegakan, Pelanggaran, Tol, Kecepatan.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST TRAFFIC OFFENCES IN TOLL ROADS REGARDING THE MAXIMUM VEHICLE SPEED LIMIT (Study on the Bakauheni-Terbanggi Toll Road)

**By
DHEA HANI SYAPUTRI**

The number of cases of traffic offences on toll roads committed by road users has resulted in an increasing number of traffic accidents. The implications of the problem include offences of traffic laws, namely offences of vehicle speed limits. To overcome traffic offences, regulations are needed on how to traffic safely, orderly, smoothly and efficiently. The issues raised as the topic of this study are forms of traffic offences on the Bakauheni-Terbanggi Besar Region toll road, the implementation of criminal law enforcement against traffic offences on toll roads regarding the maximum speed limit of vehicles in the Bakauheni-Terbanggi Besar Area, inhibiting factors for criminal law enforcement of traffic offences on toll roads regarding the maximum speed limit of vehicles in the Bakauheni-Terbanggi Besar Area.

This research uses normative juridical and empirical juridical approaches with data sources, namely primary data sources and secondary data sources. Data collection methods through literature studies, and field studies. The data is then processed and processed including data selection, data classification, and data systematization which is then analyzed qualitatively to get a conclusion obtained from the research.

The results of the research and discussion explained that criminal law enforcement against traffic offences on toll roads regarding the maximum speed limit of vehicles is in the form of crossings carried out by the Lampung Regional Police Police by installing a device in the form of a CCTV camera or what is called a speed gun. Criminal law enforcement in the form of sanctions that have been regulated in Article 287 paragraph (5) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in the form of imprisonment for a maximum of

Dhea Hani Syaputri

2 months or a maximum fine of Rp500,000.00. The inhibiting factor is from the factor of facilities and facilities, namely the number of camera distribution points that are still minimal. Law enforcement factors and community factors are also obstacles because law enforcement officials are still lacking in providing socialization and education to the community, and there are still many motorists who neglect the applicable rules such as playing cellphones, not wearing seat belts, drowsiness, and this has become a habit in society.

The suggestion in this study is that the public should be aware of the importance of safety and order in terms of traffic. Di hope that the police will continue to socialize or educate the public about violations of the maximum speed limit of vehicles on the Bakauheni-Terbanggi Besar Regional toll road in order to continue to provid

Keywords: *Implementation, Enforcement, Offences, Toll, Speed.*